

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman, H.M., (2008), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ali, H. Zainuddin, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Zainal Asikin, (2023), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aprita, Serlika dan Mona Wulandari, (2023), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana.
- Busro, Achmad, (2011), *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hutagalung, Sophar Maru, (2014), *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudiyanto, et.al, (2017), *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta.
- Margono, Sayud, (2004), *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno, (1987), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi, (2020) *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, (1986), *Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni
- Muhammad, Abdulkadir, (1990), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, (1992), *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Panjaitan, Hulman, et. al., (2019) *Perlindungan Konsumen Dalam Bingkai Hukum*, Jakarta: UKI Press.
- Panjaitan, Hulman, (2021), *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Patrik, Purwadi, (1994), *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- Satrio, J., (1999), *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni.

- Sembiring, Jimmy Joses, (2011), *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia.
- Setiawan, R., (1987), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.
- Simanjuntak, P.N.H., (2007), *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Sinamo, Nomensen, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeroso, R., (2018), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriwidodo, Joko & Kristiwanto, (2021), *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Subekti, (1992), *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta.
- Subekti, (1994), *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, (2020), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

B. Skripsi

- Nahas, Abeer El Hadi El Zein El, Tesis, (2008), *Server Hardware ,Software and Architecture*, Khartum: University of Khartoum.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 40/PDN/02/2010 Tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

D. Jurnal

- Anggraeny, Isdian & Sholahuddin Al-Fatih, (2020), *KATA SEPAKAT DALAM PERJANJIAN DAN RELEVANSINYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN WANPRESTASI*, De Legata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Vol.5 No.1.
- G, Jason, et.al., *Discord Community Challenges, Tools, and Strategies*, (2021), Connected Learning Lab.
- Holin Lin, Chuen-Tsai Sun, (2011), *Thrift Players in a Twisted Game World?—A Study on Private Online Game Servers*.
- McEwen, Lindsey J., (2011), *Literature Review: Embedding Public/Community Engagement in the Curriculum: An Example of University-Public Engagement*, National Coordinating Centre for Public Engagement, Edition 1.
- Moor, Aldo de & Sjef van Erp, (2004), *Community Dynamics in an Online Law Journal*, Proc. of the 17th Bled eCommerce Conference, Bled, Slovenia.
- Sugiarto, Suprihantosa, (2019), *Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Modernisasi*, Jurnal Qawanin, vol. 3, No.1.

E. Seminar

- Adris, Nadia, Hamidah Yamat, (2015), *Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) as Virtual Grounds for Second Language Learning: Players Perception*, International Seminar on Language Teaching, At UKM Bangi, Malaysia.

F. Artikel Internet

Buffy, *Clarifying Server Types*, (2023), Support Discord, diakses pada 12 Juni 2024, dari <https://support.discord.com/hc/en-us/articles/14078261239831-Clarifying-Server-Types>.

